

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM ISLAM
NUSANTARA
(Kajian Pedagogis atas Narasi Islam Nusantara Nahdhatul Ulama)**

Oleh:
Yunita Haryani
STKIP PGRI Bangkalan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bertujuan untuk menembus dan menghancurkan fanatisme sektarianisme sebagai makhluk yang meninggalkan masa keemasan dan kejayaan Islam nusantara. Metode yang digunakan *library research* (riset kepustakaan). Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan analisa data dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama dan budaya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat. Sehingga Pendidikan Islam Multikultural akan sangat urgen untuk menghadirkan fleksibilitas dan keterbukaan antar ummat beragama dalam keberagaman nusantara.

Kata Kunci : nilai pendidikan, multicultural, islam nusantara.

A. Pendahuluan

Sejarah membuktikan adanya koneksi antara kesultanan Aceh dan Turki *Utsmaniyyah*, Jaringan Ulama Kosmopolitan dan lokal, dan Said Nursi dan Sukarno dst. adalah salah satu bentuk polarisasi sejarah Islam di Nusantara sehingga Islam sebagai agama menguasai mayoritas masyarakat Nusantara. Kekuatan sejarah dan pendekatan budaya, sosiologi, politik dan perbandingan agama saat ini melahirkan *trand/headline* sebagai ke-khasan Islam (Islam Nusantara).¹

Sedangkan agama, pemahaman keagamaan, dan sikap keberagaman menurut Mahfud (2006) adalah tiga pengertian yang saling terkait. Agama Islam adalah kumpulan nilai Ilahiyah yang diturunkan kepada manusia untuk dipahami, dijadikan pegangan dan prinsip mengatur hidup pemeluknya. Ketika telah dipraktikkan dalam kehidupan nyata, maka secara sosiologis hal itu telah menjadi ekspresi pemahaman keagamaan. Islam adalah agama suci, penuh kedamaian, kemuliaan, menghargai kemanusiaan dan selalu mengarahkan pemeluknya untuk senantiasa menjadi jauh lebih baik dan bermartabat dihadapan Tuhan dan

¹Azyumardi Azra, *Islam Nusantara : Jaringan global dan lokal* (Bandung : Mizan, 2002), 13.

manusia. Namun demikian, salah satu masalah keagamaan mendasar secara umum saat menjadi sikap keberagaman adalah hubungan antar pemeluknya. Hal itu disebabkan tuntutan untuk mengambil sikap berpihak (panggilan agama) dalam konflik sosial yang multi dimensional ketika simbol agama mulai terseret dalam konflik tersebut, dan yang tidak berpihak akan disudutkan sebagai orang yang lemah iman.²

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbanyak di dunia, maka ketika sebuah diskusi mengangkat tentang *term* kemajuan Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari *landscap* dan peran Agama sebagai pedoman hidup pemeluknya yang ada dan hadir di Negara Multikultural ini. Maju tidaknya negara ini tergantung bagaimana sumber daya manusianya, prinsip dan sikap yang dipegang teguh para sebuah *netizen state*. Ceritera kemajuan Indonesia sebagai negara agama tentu juga tidak lepas dari bayang-bayang kegagalan dunia Islam mempertahankan masa keemasan dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Jatuhnya Baghdad menimbulkan gejolak yang luar biasa yang menyebabkan sebuah kemunduran Islam khususnya dalam ilmu pengetahuan.

Tentang Kemunduran Islam, Azyumardi Azra dalam sebuah wawancara³ menjelaskan akibat dari jatuhnya Baghdad itu kaum muslimin berada pada masa stagnan, kejemudan dan kemunduran. Masa Stagnansi ini akibat dari konflik politik diantara kaum muslimin terus menerus terjadi yang mengakibatkan stabilitas pemerintahan terganggu yang kemudian merusak sistem perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Muslim. Yang Kedua menurut Azra meningkatnya sektarianisme di kalangan kaum muslimin, sehingga terjadi fanatisme aliran/madhab dan segala upaya dihabiskan dalam rangka membela kelompok dan aliran masing-masing dengan demikian tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang dihasilkan kecuali tentang tambahan argumen untuk memperkuat aliran masing-masing. Yang Ketiga kata Azra, diharamkannya berfikir rasional (*philosophis*) karena dianggap bersebrangan dengan wahyu, yang sebenarnya rasio dan wahyu dapat berjalan dialogis. Sehingga kaum

²Muhammad Aji Nugroho, *Urgensi Dan Signifikansi Pendidikan Islam Multikultural Terhadap Kompleksitas Keberagaman Di Indonesia*(at-Tarbiyah, vol. i no 2, desember 2016, pp.179-210), 182.

³ Azyumardi Azra, *Masa kemunduran Islam*. Wawancara TV inspirasi.co 2015.

muslimin hanya terkooptasi dalam ilmu fiqih yang sempit. Kata Azra saat ini masih ada beberapa kelompok yang mempertahankan kejumudan ini.

Tiga Faktor kemunduran Peradaban Islam yang disebutkan dalam kerangka berfikir Azra, saat ini yang perlu dilakukan oleh Islam adalah berfikir rasional, meninggalkan sektarianisme yang berlebihan dan bersikap inklusif terhadap sumber sains dan teknologi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah membangun pendidikan yang menghasilkan generasi muda yang maju dan terdidik. Tidak lagi membedakan ilmu agama dan ilmu yang lain. Sehingga Ummat tidak tertinggal oleh kemajuan zaman.

B. Pendidikan Multikultural di Indonesia

Berbeda dengan negara Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara di Eropa, yang pada umumnya multikultural bersifat budaya antar bangsa, keragaman budaya datang dari luar bangsa mereka. Adapun multikultural di Indonesia bersifat budaya antar etnis yang kecil, yaitu budaya antar suku bangsa. Keragaman budaya datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri⁴. Oleh sebab itu, hal ini sebenarnya dapat menjadi modal yang kuat bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi ruh yang kuat untuk mempersatukan warga negara Indonesia yang berbeda budaya. Karena masyarakat Indonesia sangat beragam dan tinggal di wilayah pulau-pulau yang tersebar berjauhan. Dalam Deklarasi Djoeanda, laut Indonesia seluas 5,8 km², di dalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis pantai sepanjang lebih dari 80.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada⁵. Hal ini menyebabkan interaksi dan integrasi tidak selamanya dapat berjalan lancar. Demikian pula kemajuan ekonomi sulit merata, sehingga terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat, ini sangat rentan sebagai awal rasa ketidakpuasan yang berpotensi menjadi konflik. Kondisi tersebut di atas dilengkapi pula dengan sistem pemerintahan yang kurang

⁴ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 87.

⁵ Ida Zusnani, *Manajemen Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa*. (Jakarta : PT Suka Buku, 2012), 126.

memperhatikan pembangunan kemanusiaan pada era terdahulu, kebijakan negara Indonesia didominasi oleh kepentingan ekonomi dan stabilitas nasional. Sektor pendidikan politik dan pembinaan bangsa kurang mendapat perhatian. Pada saat itu, masyarakat takut berbeda pandangan, sebab kemerdekaan mengeluarkan pendapat tidak mendapat tempat, kebebasan berpikir ikut terpasung, pembinaan kehidupan dalam keragaman nyaris berada pada titik nadir.

Gerakan reformasi Mei 1998 untuk mentransformasikan otoritarianisme Orde Baru menuju transisi demokrasi sebaliknya telah menyemaikan berkembangnya kesadaran baru tentang pentingnya otonomi masyarakat sipil yang oleh Eskstrand⁶ disebut sebagai perspektif multikulturalisme radikal (*radical multiculturalism*) sebagaimana yang kini telah diakomodasi oleh Undang-Undang Sisdiknas. Di dalam konteks perkembangan sistem politik Indonesia saat ini, pilihan perspektif pendidikan yang demikian memiliki peluang dan pendidikan multikultural justru sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan sistem politik yang kuat. Pendidikan multikultural sangat menekankan pentingnya akomodasi hak setiap kebudayaan dan masyarakat subnasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kebudayaan dan masyarakat nasional.

Kesimpulannya multikultural di Indonesia bersifat budaya antar etnis yang kecil, yaitu budaya antar suku bangsa. Keragaman budaya datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Oleh karenanya, pendidikan multikultural menekankan pentingnya akomodasi hak setiap kebudayaan dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kebudayaan dan masyarakat nasional. Sehingga dalam penerapannya sangat diperlukan adanya sikap toleransi, cinta damai, dan jujur. Menurut Narwoko & Susanto dalam wikipedia yang status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Status sosial atau yang sering disebut stratifikasi sosial menunjukkan adanya suatu ketidakseimbangan yang sistematis dari kesejahteraan, kekuasaan dan prestise (gengsi) yang merupakan akibat dari adanya posisi sosial (rangking

⁶ *Ibid.*, 103.

sosial) seseorang di masyarakat. Sedangkan ketidakseimbangan dapat didefinisikan sebagai perbedaan derajat dalam kesejahteraan, kekuasaan dan halhal lain yang terdapat dalam masyarakat.

Adanya bentuk-bentuk multikultural di dalam bangsa Indonesia di atas seperti perbedaan keturunan, status sosial dan perbedaan keyakinan/agama serta untuk mengantisipasi terjadinya krisis karakter dan konflik keberagaman secara tepat guna serta lebih mengembangkan pendidikan karakter pada siswanya.

Menurut Azyumardi Azra, pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa Orde Baru memaksakan “monokulturalisme” yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang mengandung implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Bersamaan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, juga terjadi peningkatan fenomena/gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecenderungan ini jika tidak terkendali, akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, bahkan juga disintegrasi politik.⁷

Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multicultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multicultural dapat mencakup tiga jenis transformasi : (1) Transformasi diri; (2) Transformasi sekolah dan proses belajar mengajar; (3) transformasi masyarakat.

C. Epistemologi Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah

Dalam tiga dasawarsa terakhir lembaga keilmuan sains dan teknologi dan PBB mengakui bahwa tentang tiga agama abrahamik yang memiliki pengaruh terhadap peradaban dunia, termasuk Islam yang pernah memiliki peradaban yang gemilang dalam sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan pada

⁷ Azyumardi Azra, *Konflik Baru antar Peradaban; Globalisasi, radikalisme, Pluralitas*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 118.

abad pertengahan. Masa keemasan ini dicapai karena Ulama dan ilmuwan Muslim memiliki sikap keterbukaan dan tidak memiliki sikap kekhawatiran dalam sumber-sumber ilmu. Ibnu Sina memiliki karya yang sangat monumental seperti *al-Qonun fi at-Tib* kitab ini dipakai selama berabad-abad di Eropa. Nah menurut Azra sikap inklusif para ilmuwan ini seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat muslim saat ini.⁸

Berbeda dengan Azra, Muhammad Tholhah Hasan (dalam Maskuri Bakri) menyebutkan sebab kemunduran Islam telah dijelaskan oleh al-Amir Syakib Arsalan (1954) dalam bukunya *limadza Taakbora al-Islam wa Taqoddama Ghoiruhu* bahwa kemunduran Islam disebabkan beberapa hal yang penting, diantaranya adalah karena kebodohan yang menjadikan mereka tidak mampu membedakan mana tuak dan cuka (manfaat dan Mudharat), mudah dibohongi dan gampang tertipu. Kedua, karena kebobrokan moral, sehingga tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Keboborokan ini telah masuk pada kalangan elit. Ketiga, karena kehilangan karakter, tidak memiliki harga diri dan kehilangan sikap patriotisme. Namun Arsalan menyebutkan memberikan kesimpulan yang kurang dari kita adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan kualitas amal perbuatan.⁹

Pada Medio XXM, dalam pandangan sufistik, Abul A'la al-Maududi (1955) dalam bukunya *Manhaj Jadid li at-Tarbiyah wa at-Ta'lim* banyak menyampaikn otokritik terhadap mundurnya peradaban Islam saat ini, dengan tidak lagi menerjemahkan nilai wahyu (alquran) dalam kehidupan sehar—hari. Bahwa Allah telah memberikan manusia potensi yang sangat mahal yaitu as-Sam'u (pendengaran) al-Basyar (daya pengamatan), dan al-Fu'ad (daya hati nurani). Yang tidak diberikan kepada Makhhluk lain, selain manusia yang telah berkomitmen untuk menjadi *keholifah fi al-Ardi* (mandataris Allah di Bumi).¹⁰ Tiga potensi tersebut tidak dimaksimalkan oleh manusia, sehingga menurut al-Maududi menjadi faktor kemunduran Masyarakat Muslim.

⁸ Azyumardi Azra, *Kontribusi Islam*. Wawancara TV inspirasi.co 2015.

⁹ Maskuri Bakri, *Formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan Islam; analisis kritis terhadap proses pembelajaran* (Surabaya : Visipressmedia, 2017), xiii

¹⁰ *Ibid*, xiv

Tolhah juga mengutip Al-Ghazali bagaimana seharusnya masyarakat muslim bersikap terhadap ilmu duniawi, bahwa ummat harus menguasai ilmu duniawi di samping ilmu-ilmu syariah, dengan tiga alasan pertama, membangun kemakmuran bumi karena merupakan bentuk *Risalat al-Insan* sebagai bagian dari ibadah. Kedua, Allah menciptakan manusia bukan untuk menderita, tetapi manusia diciptakan untuk hidup terhormat dan bermartabat. Ketiga, tugas berjuang (*al-Jihad*) yang diwajibkan terhadap orang-orang yang beriman untuk melindungi agamanya itu tidak akan sukses apabila tidak memiliki peradaban yang maju.¹¹

Kendati Azra berpendapat bahwa telah terjadi dikotomi ilmu agama (*al-Ulum al-Islamiyah*) dan ilmu duniawi (profane) sejak masa khalifah Ma'mun, bahwa hampir bisa dipastikan kemajuan sains tidak muncul dari madrasah melainkan merupakan hasil pengembangan dan penelitian individu ilmuwan muslim.¹² Menurut Azra *Madrasah al-Tibb* (madrasah kedokteran) seperti dikemukakan Faruqi (1986) Madrasah kedokteran sebagai madrasah concern terhadap ilmu *kaumiyah* tidak dapat mengembangkan ilmu kedokteran dengan bebas karena sering digugat oleh para ahli Fiqih (*fuqoha'*) (misalnya tidak dibolehkannya menggunakan organ mayat untuk dibedah dalam rangka diselidiki atau penelitian) termasuk rumah sakit yang dikunjungi mahasiswa waktu itu hanya mendapat pembelajaran teoritis dan perawatan.¹³

Maka sebenarnya dalam konteks kontribusi pendidikan Islam dewasa ini, dengan mengambil saran Azra dan beberapa tokoh seperti yang disebut di atas sebenarnya memiliki arah yang sama dengan berbagai pendekatan. Intinya adalah bagaimana membangun pola pendidikan Islam yang terbuka (inklusif) tidak tabu dengan sumber lain atau tidak lagi terjebak pada perbedaan ilmu (dikotomi) yang menyebabkan sebuah kemunduran di bidang sains dan teknologi. Inklusifitas pendidikan Islam dalam konteks nusantara dewasa ini dikenal dengan term Pendidikan Islam Multikultural.

¹¹ Ibid, xv

¹² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan modernisasi menuju millennium baru* (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2002), ix.

¹³ Ibid, x.

Pendidikan Multikultural diharapkan mampu menciptakan sikap terbuka, toleransi, dan moderat dalam melihat sebuah perkembangan zaman. Tidak lagi mendikotomi dan bersikap intoleran terhadap ilmu lain. Pendidikan Islam Multikultural dalam semantik alquran memiliki terminologi yang sama dengan pernyataan al-Amir Syakib Arsalan (1954) dan Abul A'la al-Maududi (1955) dan beberapa tokoh di atas dalam menjawab kegusaran kejumudan dan ketertinggalan Islam dalam menghadapi kemajuan Barat. Azra mengatakan jika kemajuan abad pertengahan diraih dengan keterbukaan tanpa ada kekhawatiran akan sumber ilmu, saat ini keterbukaan (inklusifitas) atau Multikultural akan mengantarkan generasi ini menjadi lebih terbuka dan meninggalkan ego sektetarian (sektetarianisme).

D. Konsep Islam Nusantara dan Multikulturalisme; Dua Sisi Narasi

Masalah sektarianisme yang disebut Azra menjadi salah satu faktor kejumudan dan stagnansi Masyarakat Muslim, maka dengan prinsip dan tujuan Pendidikan Islam Multikultural seperti yang disampaikan di atas menegaskan dan merespon keadaan yang berkembang di Masyarakat yang masih kaku dan terjerumus dalam fanatisme sektarianisme berlebihan. Menurut Muhaimin (2003) PAI seharusnya mengarah kepada pendekatan non *Madhabi* sehingga dapat memudahkan sektarianisme dan PAI seharusnya mewujudkan perpaduan antara empirik dan sumber wahyu.¹⁴ Sektarianisme menjadi tantangan terbesar PAI Multikultural, sehingga nilai-nilai multikultural mengikis tembok kuat dan menjadikan inklusifitas sebagai dasar sikap masyarakat Muslim.

Sektarianisme atau fanatisme sektarian menurut *Syaikbul Islam* Ibnu Taymiyah (dalam Abdurrahman ibnu Mu'allal al-Wayhak) bahwa sebuah kelompok/aliran agama Islam adalah Instrumen (*Wasaili al-Da'mah*) kepada Allah, maka seorang Muslim tidak dibolehkan mengatakan kebenaran hanya didapatkan pada alirannya, baik aliran ulama fiqih (*mutafaqqihah*) maupun ulama tasaffuw (*mutasawifah*). Serta personifikasi dan pengkultusan Ulama selain Rasulullah SAW. Mereka tidak menerima sesuatu perkara dari agama kecuali

¹⁴Maskuri Bakri, *Formulasi dan implementasi kebijakan ...103*.

datang dari aliran/sektenya. Sikap Fanatisme sektarian seperti ini menurut Abdurrahman ibnu Mu'allal al-Wayhak telah melanggar tauhid asasi (*usul al-Taubid*) bahwa keimanan hanya kepada yang dibawa oleh Rasulullah yang telah mendapat risalah dari Allah.¹⁵

Laporan Penelitian Ihsan Ali Fauzi dkk (2009), menunjukkan sektarianisme telah melahirkan konflik antar agama, baik dalam bentuk aksi damai maupun kekerasan, sebagian besar konflik keagamaan terkait dengan isu-isu komunal, seperti konflik antara komunitas Muslim-Kristen dan penodaan agama. Namun, terdapat variasi geografis menyangkut isu-isu yang mendorong terjadinya konflik. Isu-isu komunal terlihat dominan di wilayah-wilayah yang memang sudah dikenal sebagai daerah konflik komunal selama ini, seperti Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Sedang di wilayah-wilayah seperti Jawa Barat dan Banten, konflik keagamaan yang terjadi lebih banyak melibatkan isu-isu moral dan sektarian. Sementara itu, di DKI Jakarta kekerasan bernuansa agama lebih melibatkan isu-isu terorisme dan moral.¹⁶

Ihsan Ali Fauzi dkk menyebutkan bahwa isu sektarian, adalah isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam Islam, kelompok Ahmadiyah, kasus Lia-Eden dan *Al Qiyadah Al Islamiyah* adalah di antara kelompok-kelompok keagamaan yang kerap memicu berbagai insiden protes maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok keagamaan maupun warga masyarakat secara umum. Sedangkan dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini.¹⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Soemanto dkk, (dalam Mohammad Aji Nogroho) konflik yang terjadi di Indonesia antara Muslim dan Nasrani adalah seperti yang terjadi di Maumere (1995), Situbondo dan Tasikmalaya (1996), Rengas Dengklok (1997), Jakarta, Solo, Kupang (1998) Poso

¹⁵Abdurrahman ibnu Mu'allal al-Wayhak, *al-Ghuluw fi al-Din fi hayati al-Muslimin al-Muayirah* (Lebanon; Banayatul maskan, 2005), 223.

¹⁶Ihsan Ali Fauzi, *et al, Pola-pola konflik keagamaan di Indonesia 1990-2008*, (Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), iv.

¹⁷*Ibid*, 7

dan Ambon (1999-2000). Adapun faktor pendorong konflik beragam menurut Yusuf (dalam Mohammad Aji Nugroho) mulai dari penghinaan terhadap ulama dan penodaan agama, perebutan wilayah agama, penangkapan dan penganiayaan tokoh ulama setempat, overakting petugas kepolisian dan keamanan serta kecemburuan sosial. Dalam menyikapinya menurut Barizi (2011), diperlukan reposisi dan revisi sistem pendidikan agama dengan memadukan integralitas kaitan agama antarasakral-transenden dan profan-fenomena sosial atau budaya.¹⁸

Islam Nusantara ketika dipahami sebagai sebuah aliran/sekte keagamaan atau agama yang mengakomodir budaya dan tradisi nusantara yang menjadikan tradisi sebagai infrastruktur agama atau agama sebagai isi budaya, maka tentu agama telah memberikan formula baru dalam sebuah negara yang tidak semua elemen masyarakat dalam negara tersebut mengafirmasi paham tersebut. Sehingga akan terjadi diskursus dan kemudian menuai konflik. Sebab masih ada beberapa kelompok lain (yang beraliran islam lurus/murni yang tidak ingin mencampur adukkan antara tradisi, budaya dan ajaran agama serta tidak ingin adanya labelisasi).

Labelisasi Islam Nusantara adalah bentuk vernakularisasi dan indigenisasi Islam karena pada saat yang sama Islam universal juga mengalami hal yang sama. Proses ini memang sulit dielakkan karena bagaimanapun pembentukan pandangan dunia dan pemahaman terhadap Islam itu sendiri ke lingkungan Masyarakat memerlukan adopsi simbol-simbol yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, Islam Nusantara tidak ansh *genieu* merepresentasikan Islam Nusantara melainkan telah terdapat pengaruh Islam Universal yang terlihat dalam ekspresi sosial budaya masyarakat dengan distingsinya yaitu Islam Indonesia merupakan salah satu dari enam wilayah budaya Islam; wilayah budaya Islam Arab, Persia, Turki, Afrika Hitam, anak benua India, dan Indonesia.¹⁹

Mengenai Islam mengakomodir Budaya, atau istilah yang santer sebagai pribumisasi Islam, dalam hal ini Gus Dur, rasanya memiliki dua gagasan besar.

¹⁸Muhammad Aji Nugroho, *Urgensi Dan Signifikansi Pendidikan Islam Multikultural...182*.

¹⁹ Azyumardi Azra, *Konflik Baru antar Peradaban; Globalisasi, radikalisme, Pluralitas*(Jakarta; PT Grafindo Persada), 162-163

Pertama, Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan sosio kultural dan politik Indonesia. *Kedua*, gagasan pribumisasi Islam. Dimensi pertama dari gagasan Gus Dur ini merupakan seruan kepada rekan-rekannya sesama Muslim untuk tidak menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif terhadap konstitusi negara-bangsa Indonesia yang sudah ada sekarang. Dalam pandangannya, sebagai satu komponen penting dari struktur sosial Indonesia, Islam tidak boleh menempatkan diri dalam posisi yang bersaing dengan komponen-komponen lainnya. Akan tetapi, Islam harus ditampilkan sebagai unsur komplementer dalam fondasi tatanan sosial, kultural, dan politik negeri ini. Upaya menjadikan Islam sebagai suatu ideologi alternatif atau pemberi warna tunggal hanya akan membawa perpecahan dalam masyarakat secara keseluruhan mengingat corak sosial kita yang beragama.²⁰

Dimensi pertama ini memberikan pengertian bahwa agama menjadi dialogis ketika berhadapan dengan budaya, kompromi dan tidak memandang marginal antara budaya dan agama keduanya dapat berjalan secara kompromi sehingga agama fleksibel dalam menyikapi budaya. Sehingga agama dan budaya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat. Islam Nusantara adalah bentuk respon dari gagasan ini dan menjadikan gagasan ini sebagai isi dari pada tujuan terma ini.

Dimensi kedua dari gagasan Gus Dur adalah pribumisasi Islam. Menurutnya, pribumisasi Islam bukanlah Jawanisasi atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal (Indonesia) dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Pribumisasi Islam bukan berarti meninggalkan norma-norma keagamaan demi budaya, namun agar norma-norma ini menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nash al-Quran*.

Menurut Gus Dur, pribumisasi Islam adalah rekonsiliasi antara budaya dan agama. Rekonsiliasi ini menuntut umat Islam memahami wahyu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual termasuk kesadaran hukum dan

²⁰M.Wahid Nur Tualeka, *Gerakan Neomodernisme Islam Di Indonesia Perspektif Cak Nur Dan Gus Dur* (al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/vol. 1, no. 1, 2015), 6

rasa keadilannya. Maka beberapa argumen yang dikemukakan Gus Dur dalam mempertahankan tawaran pribumisasi Islam. *Pertama*, alasan historis bahwa pribumisasi Islam merupakan bagian dari sejarah Islam baik di negeri asalnya maupun di negara lain termasuk Indonesia. Di sini menunjukkan bahwa Islam mengalami proses pergulatan dengan kenyataan-kenyaraan historis. Proses ini, kata Gus Dur, tidak mengubah Islam tetapi mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. *Kedua*, proses pribumisasi Islam berkaitan erat antara fiqih dengan adat.²¹ Dalam kaidah fiqih dikenal misalnya *al-'adah mubakkamah* (adat-istiadat menjadi hukum). Dalam hal ini kata Gus Dur, adat tidak mengubah nash, melainkan hanya mengubah atau mengembangkan aplikasinya.

E. Wawasan Pendidikan Multikultural dalam Islam Nusantara

Islam Nusantara dalam proses perjalanannya sejatinya menyesuaikan diri dengan gagasan Gusdur yang kedua ini. Bahwa Proses ini (Islam Nusantara), tidak mengubah Islam tetapi mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. Islam Nusantara dapat menjadi rekonsiliasi dan menuntut ummat Islam memahami wahyu (alquran) dan memahami konteks sejarah, budaya dst.

Kemudian dalam rangka memahami dua gagasan besar tersebut di atas maka peran Pendidikan Multikultural akan sangat kompatibel untuk memberikan suatu paham yang mengedepankan inklusifitas dan toleransi antar ummat beragama, Pendidikan dianggap sebagai salah satu cara dalam merespon segala tantangan zaman. Maka Pendidikan Islam Multikultural akan sangat urgen untuk menghadirkan fleksibilitas dan keterbukaan antar ummat beragama dalam keberagaman nusantara.

Multikulturalisme dalam konteks filsafat tidak dapat dipisah dari pemikiran dua filsuf kontemporer, Professor Jhon Rawls dari *Harvard University* dan *Professor Charles Taylor* dari *McGill University*. Rawls adalah seorang penganut liberalisme terutama dalam bidang etika, Taylor dalam bidang filsafat budaya dan politik. Dalam buku *Theory of Justice*, Rawls (1972) menghidupkan kembali teori "*social contract*". Menurut Rawls masyarakat yang adil bukanlah hanya menjamin

²¹M. Wahid Nur Tualeka, Gerakan Neomodernisme Islam Di Indonesia Perspektif Cak Nur Dan Gus Dur (al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/vol. 1, no. 1, 2015), 7

“*the greatest good for the greatest number*” yang terkenal dalam prinsip dalam demokrasi.²²

Menurut Rawls manusia dilahirkan tanpa mengetahui akan sifat-sifatnya, posisi sosialnya dan keyakinan moralnya. Dalam keadaan yang demikian, maka manusia dalam situasi tersebut tidak memaksimalkan kemampuan-kemampuannya karena ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu manusia menimilisir kemampuannya karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kemampuan tersebut. Dari posisinya yang asli itu Rawls mengemukakan dua prinsip. Satu, setiap manusia harus mempunyai sejumlah kebebasan individual untuk bersama-sama menikmati kebebasan yang dimiliki orang lain. Dua, setiap ketidaksamaan sosial dan ekonomi haruslah memberikan kemungkinan keuntungan bagi yang tidak memperoleh keberuntungan. Baik keberuntungan dalam mendapatkan kesempatan kerja dll. Prinsip yang pertama harus bisa dilakukan sebelum prinsip yang kedua.²³

Kemudian Teori Robert Nozick di dalam bukunya *Anarchy state Utopia* (1974). Teori libertarian mengenai kesamaan sosial berdasarkan hak individu.²⁴ Kedua Teori tersebut dalam sejarahnya perjalanannya berkembang dan menjadi landasan bernegara dan secara konstektual tidak bertentangan dengan teori al-Quran melalui ajaran profetik tentang agama yang dicintai Allah adalah yang hanif dan mengedepankan toleransi (*tasamuh*), tolong menolong (*ta’awun*), dan nilai lainnya yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, hidup berkembang dan berpartisipasi.

Teori Weltanchauung dari bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tersirat dalam UU Dasar 1945 yang itu “bangsa yang cerdas” sudah tertentu bangsa yang cerdas terdiri dari individu-individu yang cerdas. Apakah yang dimaksud dengan individu yang cerdas. Pendidikan Multikultural merupakan sarana pengembangan manusia cerdas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut ini adalah ciri-ciri manusia cerdas :

²²H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan Nasional* (Jakarta:Grasindo, 2004),75-76

²³Ibid., 76-77.

²⁴Ibid, 76

Tabel 01. Manusia Indonesia Cerdas²⁵

Sikap & Tingkah laku	Kompetensi
Cerdik-pandai (<i>educated</i>)	Kemampuan analitis Dapat mengambil pilihan Menguasai ilmu pengetahuan Gemar belajar
Enerjik Kreatif	Daya kreatif Rajin, kerja keras Tahan Uji
Responsif terhadap masyarakat demokratis	Toleransi terhadap perbedaan Persatuan Indonesia yang pluralistic Inklusifisme
Daya Guna (<i>skilled</i>)	Keterampilan yang bermanfaat Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia
Akhlak Mulia (<i>moral, religius</i>)	Bermoral Anti korupsi, atau kolusi, anti nepotisme Religius substantif
Sopan santun	Mengenal adat istiadat setempat Mengenal data pergaulan internasional

Namun di dalam Nilai Pendidikan Islam Multikultural, Gusdur (dalam Mun'im 2005) menuturkan bahwa peradaban dunia ini dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan baik jika terwujud nilai-nilai multikultural, seperti Humanis, toleransi, menghargai, menerima, mengutamakan silaturahmi, (dialog) pada semua individu, kelompok organisasi, dan lintas paham keyakinan, menyayangi kaum lemah, dan monoritas, menjaga persatuan, dan perdamaian, mengembangkan budaya, menjaga kearifan budaya lokal dalam masyarakat.²⁶ Sedangkan M. Tholhah Hasan menjelaskan bahwa nilai-nilai yang harus ada

²⁵*Ibid*, 203.

²⁶*Ibid*, 91

dalam masyarakat adalah komitmen untuk bisa hidup bersama, saling menghormati, bekerjasama, tolong menolong, gotong royong dalam suasana hidup rukun dan damai.

Tabel 02.

Tabel Nilai Pendidikan Islam Multikultural
madzhab Gusdur dan Tolchah Hasan

Gusdur	Tolchah Hasan
Humanis	Kometmen untuk bisa hidup bersama
Toleransi	Saling hormati
Menghargai	Bekerjasama
Menerima	Tolong menolong
Mengutamakan silaturahmi	Gotong royong
Dialog lintas kelompok keagama	Hidup rukun dan damai
An	
Menyayangi yang lemah dan minoritas	
Menjaga Persatuan	
Menjaga kearifan local dalam masyarakat	

Konsep dasar dan prinsip internalisasi nilai multikultural dalam disain pendidikan agama Islam berdasarkan pengembangan kurikulum sangatlah penting, sebab kurikulum dapat dipahami sempit (*narrow sense*) dan komprehensif (*wide sense*). Kurikulum dalam arti yang sempit dapat dipahami sebagai kurikulum transformasi ilmu kepada anak didik. Namun kurikulum secara global komprehensif adalah semua bentuk pengalaman yang baik (*good learning experience*) baik di sekolah maupun di luar sekolah yang sudah terkonsep/terprogram (Olivia, 1992). Nilai pendidikan multikultural didasarkan pada masyarakat yang memberikan apresiasi kepada keberagaman dan perbedaan (*diversity*).

Menciptakan kedamaian (*creating peace*), menjaga hak asasi manusia (*protect human rights*) dan menegakkan demokrasi.

Dalam konteks pendidikan Islam. Konten kurikulum harus mampu mengakomodasi/menpresentasikan seluruh kelas. *At least*, untuk memperkenalkan kepada pembelajar bahwa Islam terdiri dari berbagai perspektif yang tidak ada satu elemen yang merasa paling benar dan menganggap yang lain salah. Yang demikian itu bukanlah bagian dari Islam. Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural harus berpegangan kepada prinsip dasar Islam yang meliputi pertama, *oriented on Islam* harus perspektif Islam, baik dalam pembelajaran dan nilai (*values*). Keduanya berpadu di dalam kurikulum, *philosophy*, tujuan, isi (*the contents*), metode pembelajaran (*teaching methods*), menjaga hubungan baik antar institusi pendidikan. Kedua, prinsip universal yang mendasari landasan kurikulum. Ketiga, Prinsip adanya keseimbangan antara prinsip dan konten kurikulum. Keempat, Prinsip kebutuhan antara individu dan sosial, keseimbangan antara lingkungan dan pendidikan, relevansi kehidupan sekarang dan yang akan datang, relevansi dengan kebutuhan dunia pekerjaan. Kelima, Prinsip keadilan dalam keberagaman anak, perbedaan kepribadian dan faktor status sosial. Keenam, prinsip fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan perkembangan sains dan teknologi dan memberikan gerakan kebebasan dalam melakukan kreativitas. Ketujuh, Prinsip integrasi antar subjek, pengalaman aktivitas kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak dan kelompok. Kedelapan, prinsip efektifitas dan efisiensi dan penggunaan bahan sumber ajar yang menciptakan dampak positif dalam perkembangan anak.²⁷

Maka jika Islam Nusantara dilihat sebagai peradaban, maka harus dilestarikan dan dikembangkan dengan nilai-nilai multikultural, Humanis, toleransi, menghargai, menerima, mengutamakan silaturahmi (dialog) pada semua individu, kelompok organisasi, dan lintas paham keyakinan, menyayangi kaum lemah, dan minoritas, menjaga persatuan, dan perdamaian, mengembangkan budaya, menjaga kearifan budaya lokal dalam masyarakat.

²⁷ Mohammad Mizan Habibi, *Islamic Education Curriculum Framework Development Based On Multicultural Values (Proceedings Of 99th The Iier International Conference, Mecca, Saudi Arabia, 23rd-24th March 2017, Isbn: 978-93-86291-88-2)*, 41

Nilai-nilai tersebut di atas menjadi landasan dan acuan dalam pendidikan Islam multikultural. Dengan kata lain Islam Nusantara menjadi responsif dengan generasi Islam yang memiliki wawasan multikultural dan inklusif. Sehingga akan mengecilkan probabilitas konflik sosial dan kekerasan di tengah masyarakat.

F. Kesimpulan

Pendidikan Islam Multikultural dalam kajian ini bertujuan untuk menembus dan menghancurkan fanatisme sektarianisme sebagai makhluk yang meninggalkan masa keemasan dan kejayaan Islam. Islam Nusantara seharusnya mengikuti pandangan Gusdur. Ada dua dimensi, dimensi pertama ini memberikan pengertian bahwa agama menjadi dialogis ketika berhadapan dengan budaya, kompromi dan tidak memandang marginal antara budaya dan agama keduanya dapat berjalan secara kompromi sehingga agama fleksibel dalam menyikapi budaya. Sehingga agama dan budaya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat. Islam Nusantara adalah bentuk respon dari gagasan ini dan menjadikan gagasan ini sebagai isi dari pada tujuan terma ini. Islam Nusantara dalam proses perjalanannya sejatinya menyesuaikan diri dengan gagasan Gusdur yang kedua ini. Bahwa Proses ini (Islam Nusantara), tidak mengubah Islam tetapi mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. Islam Nusantara dapat menjadi rekonsiliasi dan menuntut ummat Islam memahami wahyu (al Quran) dan memahami konteks sejarah, budaya dst. Kemudian dalam rangka memahami dua gagasan besar tersebut di atas maka peran Pendidikan Multikultural akan sangat kompatibel untuk memberikan suatu paham yang mengedepankan inklusifitas dan toleransi antar umat beragama, pendidikan dianggap sebagai salah satu cara dalam merespon segala tantangan zaman. Maka Pendidikan Islam Multikultural akan sangat urgen untuk menghadirkan fleksibilitas dan keterbukaan antar umat beragama dalam keberagaman nusantara.

G. Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi *Konflik Baru antar Peradaban; Globalisasi, radikalisme, Pluralitas* (Jakarta; PT Grafindo Persada, 2002)
- _____, *Pendidikan Islam; Tradisi dan modernisasi menuju millennium baru* (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2002)
- _____, *Islam Nusantara : Jaringan global dan lokal* (Bandung : Mizan, 2002),
- _____, *Masa kemunduran Islam*. Wawancara TV inspirasi.co 2015.
- _____, *Kontribusi Islam*. Wawancara TV inspirasi.co 2015.
- Ali Fauzi, Ihsanet all, *Pola-pola konflik keagamaan di Indonesia 1990-2008*, (Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF)
- al-Wayhak, Abdurrahman ibnu Mu'allal. *al-Gbuluw fi al-Din fi hayati al-Muslimin al-Muayirah* (Lebanon; Banayatul maskan, 2005)
- Bakri, Maskuri *Formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan Islam; analisis kritis terhadap proses pembelajaran* (Surabaya : Visipressmedia, 2017)
- M. Wahid Nur Tualeka, *Gerakan Neomodernisme Islam Di Indonesia Perspektif Cak Nur Dan Gus Dur* (al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/vol. 1, no. 1, 2015)
- Nugroho, Muhammad Aji. *Urgensi Dan Signifikansi Pendidikan Islam Multikultural Terhadap Kompleksitas Keberagamaan Di Indonesia* (at-Tarbiyah, vol. i no 2, desember 2016, pp.179-210)
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004)